

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA***(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO***(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset Lancar

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,832,529,304	-
Jumlah Pendapatan	2,832,529,304	-
Belanja		
Belanja Pegawai	7,557,000,000	-
Belanja Barang	10,717,544,000	-
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	18,274,544,000	-

Realisasi Pendapatan
Rp2,832,529,304

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,832,529,304 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,832,529,304. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hingga 31 Desember 2025 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNPB senilai Rp. 2.832.529.304 atau persentase 164.49% dari pagu PNPB, dengan rincian sebagai berikut:

1. Akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya Rp1.137.990.000
2. Akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp1.682.382.500
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasana Sesuai dengan Tusi senilai Rp12.156.804

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	2,832,529,304	-
Jumlah	-	2,832,529,304	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 7.71 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,832,529,304	2,629,830,631	7.71
Jumlah	2,832,529,304	2,629,830,631	7.71

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp2,832,529,304

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp2,832,529,304 dan Rp2,629,830,631. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 7.71 dari TA 2024 Hingga 31 Desember 2025 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNBП senilai Rp. 2.832.529.304 atau persentase 164.49% dari pagu PNBП, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.Akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya Rp1.137.990.000
- 2.Akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp1.682.382.500
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi senilai Rp12.156.804. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,832,529,304	2,629,830,631	7.71
Jumlah	2,832,529,304	2,629,830,631	7.71

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp15,951,267,946 atau 0.00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	7,118,157,771	-
Belanja Barang	-	7,164,903,855	-
Belanja Modal	-	1,668,206,320	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	15,951,267,946	-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 2.66% Terdapat peningkatan realisasi belanja Barang pada TA.2025 bila dibandingkan TA.2024. Realisasai Belanja senilai Rp15.951.267.946 dengan presentase 79,88%. baik pada belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang. . Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	7,118,157,771	6,531,865,403	8.98
Belanja Barang	7,164,903,855	9,454,818,253	(24.22)
Belanja Modal	1,668,206,320	399,765,131	317.30
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	15,951,267,946	16,386,448,787	(2.66)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp7.118.157.771

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,118,157,771 dan Rp6,531,865,403. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 8.98 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Terdapat Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 Ini Dibanding Tahun Sebelumnya Dikarenakan Adanya Penambahan Pegawai (PPPK) Sebanyak 3 Orang, Kenaikan Pangkat/Golongan Dan Penambahan Jumlah Anggota Keluarga Pegawai Yang Menerima Tunjangan. Jumlah Pegawai LPSPL Serang Hingga 31 Desember 2025 Sebanyak 51 Orang PNS Dan 5 PPPK. Hingga 31 Desember 2025 Ini Terdapat Pengembalian Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Umum PNS Senilai Rp 1.100.150 Pada Semester I Dan Semester III dan pembulatan senilai Rp807,-

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2,449,458,840	2,313,739,150	5.87
Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,997	36,706	3.52
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	176,063,600	166,089,770	6.01
Belanja Tunj. Anak PNS	55,215,900	50,772,178	8.75
Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	11,880,000	6.06
Belanja Tunj. Fungsional PNS	179,900,000	157,280,000	14.38
Belanja Tunj. PPh PNS	13,232,572	11,692,993	13.17
Belanja Tunj. Beras PNS	140,132,700	134,556,360	4.14
Belanja Uang Makan PNS	329,118,000	274,205,000	20.03
Belanja Tunjangan Umum PNS	61,290,000	63,040,000	(2.78)
Belanja Uang Lembur	112,342,000	25,965,000	332.67
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,257,801,489	3,124,318,448	4.27
Belanja Gaji Pokok PPPK	118,533,200	76,886,400	54.17
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,579	1,660	55.36
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,922,160	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,580,000	6,480,000	125.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,983,100	1,738,080	129.17
Belanja Uang Makan PPPK	18,019,000	10,286,000	75.18
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	166,913,727	102,897,658	62.21
Belanja Tunjangan Anak PPPK	768,864	-	-
Belanja Uang Lembur PPPK	5,688,000	-	-
Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,665,000	-	-
Jumlah Belanja kotor	7,119,268,728	6,531,865,403	8.99
Pengembalian Belanja Pegawai	1,110,957	-	-
Jumlah Belanja	7,118,157,771	6,531,865,403	8.98

Realisasi Belanja
Barang
Rp7,164,903,855

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,164,903,855 dan Rp9,454,818,253. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 24.22% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Tidak terdapat kenaikan belanja barang pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya dikarenakan efisiensi anggaran dan pagu anggaran dalam masa pemblokiran.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	437,908,202	658,589,826	(33.51)
Belanja Barang Non Operasional	1,646,911,920	1,515,872,872	8.64
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,420,988	98,463,630	(65.04)
Belanja Jasa	3,255,586,688	2,830,574,814	15.02
Belanja Pemeliharaan	270,523,542	527,330,796	(48.70)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,519,552,515	3,624,220,900	(58.07)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	199,765,415	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	7,164,903,855	9,454,818,253	(24.22)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	7,164,903,855	9,454,818,253	(24.22)

Realisasi Belanja Modal
Rp1,668,206,320

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,668,206,320 dan Rp399,765,131. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 317.30% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Terdapat peningkatan belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 ini dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya karena pada tahun ini terdapat peningkatan belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin berupa paket Sound System Ruangan Meeting Pelayanan, Sarana Ruang Perizinan, Kendaraan, Drone, Alat Pencetak, Media Digital Informasi Pelayanan, Mesin Antrian Konsultasi, Video Conference, Genset, Teropong Binokuler, GPS, Alat Pengolah Data Pelayanan Perizinan, Alat Pengolah Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi .

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,668,206,320	399,765,131	317.30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,668,206,320	399,765,131	317.30
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1,668,206,320	399,765,131	317.30

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah hingga 31 Desember 2025

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp1,668,206,320

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1,668,206,320 dan Rp399,765,131, mengalami kenaikan sebesar 317.30 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah peralatan dan mesin berupa pembelian Sound System Ruangan Meeting Pelayanan senilai Rp62.500.000, Sarana Ruang Perizinan senilai Rp.102.411.000, Meteran Digital senilai Rp3.190.000, Kendaraan senilai Rp.500.000.000, Drone senilai Rp125.000.000, Alat Pencetak senilai Rp17.000.000, Media Digital Informasi Pelayanan senilai Rp55.500.000, Mesin Antrian Konsultasi Rp23.000.000, Video Conference senilai Rp29.000.000, Genset Rp160.738.000, Teropong Binokuler senilai Rp23.310.000, GPS senilai Rp24.000.000, Pengolah Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi senilai Rp350.000.000, Alat Pengolah Data Pelayanan Perizinan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,668,206,320	399,765,131	317.30
Jumlah Belanja Kotor	1,668,206,320	399,765,131	317.30
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1,668,206,320	399,765,131	317.30

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan TA 2025..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Pada 31 Desember 2025 terdapat kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Hingga 31 Desember 2025 terdapat piutang bukan pajark terkait sewa rumah negara

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0
Persediaan Rp169,100

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo penyisihan piutang tidak tertagih.

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp169,100 dan Rp699,500. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	169,100	699,500
Jumlah	169,100	699,500

Persediaan tersebut di atas dalam Pada 31 Desember 2025 terdapat persediaan senilai Rp169.100,- yang terdiri dari persediaan barang konsumsi seperti Alat Tulis Kantor, Kertas dan lain-lain.

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Tidak terdapat persediaan yang belum diregister hingga 31 Desember 2025

Tanah
Rp39,759,850,000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp39,759,850,000 dan Rp36,930,718,000. Nilai Tanah tersebut Hingga 31 Desember 2025 terdapat perolehan tanah senilai Rp2.829.132.000,- merupakan Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang telah ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Berita Acara Nomor BA-266/KN/2025 tanggal 13 November 2025.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	36,930,718,000
Mutasi tambah :	
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang :	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	36,930,718,000

Peralatan dan Mesin
Rp8,229,293,108

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp8,229,293,108 dan Rp6,561,086,788. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025		6,561,086,788
Mutasi tambah:		
Pembelian		1,668,206,320
Perolehan Lainnya		23,815,000
Mutasi Kurang:		
Saldo per 31 Desember 2025		8,229,293,108
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(5,764,425,565)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		2,464,867,543

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

Hingga 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain : GPS senilai Rp15.384.406, Teropong Binokular senilai Rp19.813.500, Video Conference senilai Rp.28.900.000, Mesin Antrian Konsultasi senilai Rp23.000.000, Media Digital Informasi Pelayanan senilai Rp55.500.000, Alat pencetak dokumen hasil verifikasi pelayanan periziinan senilai Rp14.430.000, Kendaraan FUngsional Pelayanan Perizinan senilai Rp500.000.000, Sarana Ruangan Pelayanan Perizinan senilai 217.617.915, Paket Sound System Ruang Meeting Pelayanan senilai Rp62.500.000, Alat Pengolah Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi Lapangan Perizinan Ruang Laut senilai Rp303.969.999, Alat Pengolah Data Pelayanan Perizinan senilai Rp126.137.500, Drone senilai Rp105.450.000, Genset senilai Rp160.506.000, Laptop senilai Rp1.350.373.117,-.

Gedung dan Bangunan
Rp8,233,338,475

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8,233,338,475 dan Rp8,233,338,475. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025		8,233,338,475
Mutasi tambah:		
		-
		-
Mutasi Kurang:		
		-
Saldo per 31 Desember 2025		8,233,338,475
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(1,262,394,952)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		6,970,943,523

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp517,299,000

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.517,299,000 dan Rp.517,299,000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025		517,299,000
Mutasi tambah:		
		-
Mutasi Kurang:		
		-
Saldo per		517,299,000
Akumulasi Penyusutan s.d.		(484,189,589)
Nilai Buku per		33,109,411

Aset Tetap Lainnya
Rp150,365,000

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.150,365,000 dan Rp.150,365,000. Aset tetap tersebut Tidak terdapat kenaikan/penurunan aset tetap lainnya pada Hingga 31 Desember 2025. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025		150,365,000
Mutasi tambah:		
Reklasifikasi Masuk		-
		-
Mutasi Kurang:		
		-
Saldo per 31 Desember 2025		150,365,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		-
Nilai Buku per 31 Desember 2025		150,365,000

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp7,511,010,106

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp7,511,010,106 dan Rp6,509,826,723. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8,229,293,108	(5,764,425,565)	2,464,867,543
2	Gedung dan Bangunan	8,233,338,475	(1,262,394,952)	6,970,943,523
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	517,299,000	(484,189,589)	33,109,411
4	Aset Tetap Lainnya	150,365,000	-	150,365,000
Akumulasi Penyusutan		17,130,295,583	(7,511,010,106)	9,619,285,477

Aset Lain-lain
Rp73,536,500

C.12 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp73,536,500 dan Rp73,536,500. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	73,536,500
Mutasi tambah:	
	-
Saldo Awal	-
Mutasi Kurang:	
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	-
Saldo per 31 Desember 2025	73,536,500
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(73,536,500)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat mutasi kurang aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 73,536,500

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp73,536,500 dan Rp73,536,500. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	73,536,500	(73,536,500)	-
-	-	-	-
Total	73,536,500	(73,536,500)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp14,436,628

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Terdapat utang kepada pihak ketiga hingga 31 Desember 2025 senilai Rp0,-

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	14,436,628	11,693,729
Total	14,436,628	11,693,729

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat Utang kepada pihak ketiga.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.15 Uang Muka dari KPPN

Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat uang muka dari KPPN.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat kas di bendahara pengeluaran

Ekuitas
Rp49,804,772,949

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49,804,772,949. dan Rp45,871,986,311. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp2,796,358,504

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2,796,358,504 dan Rp2,618,331,475. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6.80. Hal tersebut disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 terdapat kenaikan pendapatan PNBP senilai Rp. 2.796.358.504 sedangkan pada realisasi anggaran (LRA) senilai Rp. 2.832.529.304 sehingga terdapat selisih senilai Rp36.170.800 dikarenakan adanya pengembalian antara lain:

- pengembalian PNBP pada semester III pada akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya senilai 15.610.800 dikarenakan kelebihan penarikan tarif PNBP pengambilan alam pada tahun 2023 dan adanya pengajuan permohonan pengembalian dari pelaku usaha di tahun 2025
- pengembalian PNBP pada semester III/tahunan pada akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya dan akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya senilai Rp20.560.000 salah penggunaan akun SIMPONI saat membuat kode billing oleh PIC Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik dikarenakan pada tanggal 18 November 2025 Bendahara Penerimaan terdapat eror pada system SIMPONI LPSPL Serang sehingga tidak muncul pilihan untuk membuat kode billing, Bendahara Penerimaan meminta bantuan kepada PIC Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik untuk membuka akun LPSPL Serang. PIC Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik kesalahan login akun sehingga ada 16 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibuat dengan akun SIMPONI LPSPL Serang untuk pembayaran PNBP SAJI LN, Sudah ada 7 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibayarkan, Karena dibutuhkan penerbitan dokumen SAJI LN dalam waktu dekat, Kembali dibuat 16 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) dengan akun SIMPONI Setditjen PRL, 7 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibayarkan juga sudah membayarkan Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) dengan akun SIMPONI Setditjen PRL sehingga terdapat dobel pungut pada 2 akun yang berbeda, sehingga dilakukannya pengembalian PNBP kepada pelaku usaha.

. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	12,156,804.00	(100.00)
Pendapatan Jasa Lainnya	1,652,091,700	1,514,159,671.00	9.11

Pendapatan Perizinan Lainnya	1,132,110,000	1,092,015,000.00	3.67
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	2,796,358,504.00	2,618,331,475.00	6.80

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,118,157,771 dan Rp6,540,446,903.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 8.83 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Terdapat Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 Ini Dibanding Tahun Sebelumnya Dikarenakan Adanya Penambahan Pegawai (PPPK) Sebanyak 3 Orang, Kenaikan Pangkat/Golongan Dan Penambahan Jumlah Anggota Keluarga Pegawai Yang Menerima Tunjangan. Jumlah Pegawai LPSPL Serang Hingga 31 Desember 2025 Sebanyak 51 Orang PNS Dan 5 PPPK. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	2,449,458,840	2,322,320,650	5.47
Beban Pembulatan Gaji PNS	37,190	36,706	1.32
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	176,063,600	166,089,770	6.01
Beban Tunj. Anak PNS	55,215,900	50,772,178	8.75
Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	11,880,000	6.06
Beban Tunj. Fungsional PNS	179,900,000	157,280,000	14.38
Beban Tunj. PPh PNS	13,232,572	11,692,993	13.17
Beban Tunj. Beras PNS	140,132,700	134,556,360	4.14
Beban Uang Makan PNS	329,118,000	274,205,000	20.03
Beban Tunjangan Umum PNS	60,179,850	63,040,000	(4.54)
Beban Uang Lembur	112,342,000	25,965,000	332.67
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,257,801,489	3,124,318,448	4.27
	-	-	-
Jumlah	7,118,157,771	6,540,446,903	8.83

Beban Persediaan
Rp34,951,388

D.3 **Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34,951,388 dan Rp99,472,230

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 64.86 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat peningkatan pada beban persediaan dibandingkan TA sebelumnya.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	34,951,388	99,407,230	(64.84)
Beban Persediaan bahan baku	-	65,000	(100.00)
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	34,951,388.00	99,472,230	(64.86)

Beban Barang dan Jasa
Rp4,903,244,709

D.4 **Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,903,244,709 dan Rp5,182,761,378.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 5.39 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat peningkatan pada beban persediaan dibandingkan TA sebelumnya.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	295,696,002	434,968,426	(32.02)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,612,200	6,537,400	(60.04)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97,800,000	139,194,000	(29.74)
Beban Barang Operasional Lainnya	41,800,000	77,890,000	(46.33)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Bahan	1,646,911,920	1,515,872,872	8.64
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Beban Langganan Listrik	141,493,630	179,548,159	(21.19)
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Langganan Air	26,184,260	37,328,728	(29.85)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	75,677,899	84,420,769	(10.36)
Beban Jasa Konsultan	79,500,000	-	-
Beban Sewa	887,732,770	1,107,726,368	(19.86)
Beban Jasa Profesi	153,400,000	192,315,000	(20.24)
Beban Jasa Lainnya	1,454,436,028	1,406,959,656	3.37
Jumlah	4,903,244,709	5,182,761,378.00	(5.39)

D.5 **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp270,523,542 dan Rp527,594,596.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 48.73 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 Beban pemeliharaan tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tidak terdapat selisih beban pemeliharaan (LO) dengan realisasi anggaran beban pemeliharaan pada LRA. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	166,883,157	321,669,905	(48.12)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	263,800	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103,640,385	205,660,891	(49.61)
Jumlah	270,523,542	527,594,596	(48.73)

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.519,552,515

D.6 **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,519,552,515 dan Rp3,624,220,900

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 58.07 persen disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat peningkatan Beban Perjalanan Dinas dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Tidak terdapat selisih beban perjalanan dinas (LO) dengan realisasi anggaran perjalanan dinas pada LRA. . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	1,452,316,643	2,842,576,942	(48.91)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,121,275	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	51,114,597	781,643,958	(93.46)
Jumlah	1,519,552,515.00	3,624,220,900	(58.07)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.7 **Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Tidak terdapat beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat hingga 31 Desember 2025

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 100.00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan olehHingga 31 Desember 2025 tidak terdapat peningkatan Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya.. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	199,765,415.00	(100.00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
Jumlah	-	199,765,415	(100.00)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1,001,183,383

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,001,183,383 dan Rp938,334,383.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	790,435,898	703,134,623	12.42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173,370,717	173,370,717	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	22,292,375	44,584,750	(50.00)
Beban Penyusutan Irigasi	14,849,143	14,849,143	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	2,159,900	(100.00)
Beban Penyusutan Jaringan	235,250	235,250	-
Jumah Penyusutan	1,001,183,383	938,334,383	6.70
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1,001,183,383	938,334,383	6.70

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-42,908

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	(42,908)	(100.00)
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	(42,908)	(100)

Tidak terdapat beban penyisihan piutang tak tertagih hingga 31 Desember 2025

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp23,815,000

Pos Luar Biasa Rp0

D.10 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Tidak terdapat Penjualan Aset Non Lancar hingga 31 Desember 2025

D.11 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Penyelesaian kewajiban jangka panjang hingga 31 Desember 2025

D.12 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23,815,000 dan Rp11,499,156.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8,581,500.00	(100.00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2,917,656.00	(100.00)
Jumlah	-	11,499,156	(100.00)

D.13 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat pos luar biasa hingga 31 Desember 2025

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :
Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat realisasi belanja penanganan pandemi covid-19

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp45,871,986,311.00*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.45,871,986,311.00 dan Rp.46,564,987,185.00

*Defisit LO Rp.-
12,027,439,804.00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-12,027,439,804.00 dan Rp.-14,482,722,266.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-23,815,000 dan Rp.24,787,236 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak Terdapat Koreksi Atas Reklasifikasi hingga 31 Desember 2025.

*Selisih Revaluasi Aset
Rp.0.00*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Tidak terdapat selisih revaluasi aset hingga 31 Desember 2025

*Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp-
23,815,000*

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

koreksi Aaset Tetap Non Revaluasi tahun 2025 senilai 23,815,000

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp15,984,041,442

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.15,984,041,442 dan Rp.13,764,934,156. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	15,951,267,946
Diterima dari Entitas Lain	(2,796,358,504)
Jumlah	15,984,041,442

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 15,951,267,946, sedangkan DDEL sebesar Rp 2,796,358,504

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Hingga 31 Desember 2025 tidak terdapat transfer masuk/ transfer keluar

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Tidak terdapat Pengesahan hibah langsung hingga 31 Desember 2025

Ekuitas Akhir
Rp49.819.209.577.

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2025 yakni senilai Rp49.819.209.577,- dan tahun 2024 yakni senilai Rp45.871.986.311

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tahun anggaran 2025 ini terdapat pagu anggaran senilai Rp19.968.400.000 yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni senilai Rp11.778.400.000 dan PNBPNP senilai Rp8.190.000.000, Pagu Efektif senilai Rp16.605.943.000 dan Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 15.951.267.946 atau mencapai 99.06 %. Realisasi dari sumber dana Rupiah Murni senilai Rp 10.429.415.852 atau 88.55% dari pagu Rupiah Murni Rp11.778.400.000 dan dari sumber dana PNBPNP senilai Rp 5.521.852.094 atau 67.42% dari pagu PNBPNP senilai Rp8.190.000.000. Hingga periode 31 Desember 2025 LPSPL Serang terdapat pagu blokir senilai Rp3.362.457.000 yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni senilai Rp 859.237.000 dan PNBPNP senilai Rp 2.503.220.000. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan Desember 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.796.358.504 atau persentase 164.4% dari dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp 1.700.000.000. Hingga 31 Desember 2025, Capaian Output Satker LPSPL Serang mencapai 100%.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. *Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

Hingga 31 Desember 2025 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNBPNP senilai Rp.2.832.529.304 atau persentase 164.4% dari pagu PNBPNP, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Perizinan Lainnya Rp1.1379.990.000
2. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp1.682.382.500
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasana Sesuai dengan Tusi senilai Rp12.156.804

Terdapat pengembalian PNBPNP dari 2 (dua) akun pendapatan negara bukan pajak antara lain:

- pengembalian PNBPNP pada semester III pada akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya senilai 15.610.800 dikarenakan kelebihan penarikan tarif PNBPNP pengambilan alam pada tahun 2023 dan adanya pengajuan permohonan pengembalian dari pelaku usaha di tahun 2025
- - pengembalian PNBPNP pada semester III/tahunan pada akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya dan akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya senilai Rp20.560.000 salah penggunaan

akun SIMPONI saat membuat kode billing oleh PIC Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik dikarenakan pada tanggal 18 November 2025 Bendahara Penerimaan terdapat eror pada system SIMPONI LPSPL Serang sehingga tidak muncul pilihan untuk membuat kode billing, Bendahara Penerimaan meminta bantuan kepada PIC Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik untuk membuka akun LPSPL Serang. PIC Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik kesalahan login akun sehingga ada 16 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibuat dengan akun SIMPONI LPSPL Serang untuk pembayaran PNBP SAJI LN, Sudah ada 7 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibayarkan, Karena dibutuhkan penerbitan dokumen SAJI LN dalam waktu dekat, Kembali dibuat 16 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) dengan akun SIMPONI Setditjen PRL, 7 Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) yang dibayarkan juga sudah membayarkan Bukti Pembuatan Tagihan (kode Billing) dengan akun SIMPONI Setditjen PRL sehingga terdapat dobel pungut pada 2 akun yang berbeda, sehingga dilakukannya pengembalian PNBP kepada pelaku usaha.

2. Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)

Terdapat Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) senilai Rp439.905.000,- terkait Sewa Gerai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut sebanyak 4 lokasi dan sewa Kendaraan Fungsional Layanan di Wilker sebanyak 4 (empat) unit diantara lain:

1. Sewa Gerai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Banjarbaru Kalimantan Selatan 12 Bulan Januari - Desember 2026 senilai Rp85.555.556,-
2. Sewa Gerai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Jawa Barat 12 Bulan Januari - Desember 2026 senilai Rp94.444.444,-
3. Sewa Gerai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Lampung 12 Bulan Januari - Desember 2026 senilai Rp33.000.000,-
4. Sewa Gerai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut JawaTengah 12 Bulan Januari - Desember 2026 senilai Rp90.825.000,-
5. Sewa Kendaraan Fungsional Layanan di Wilker Jawa Tengah 6 Bulan Januari-Juni 2026 senilai Rp34.020.000,-
6. Sewa Kendaraan Fungsional Layanan di Wilker Jakarta 6 Bulan Januari-Juni 2026 senilai Rp34.020.000,-
7. Sewa Kendaraan Fungsional Layanan di Wilker Banten 6 Bulan Januari-Juni 2026 senilai Rp34.020.000,-
8. Sewa Kendaraan Fungsional Layanan di Wilker Lampung 6 Bulan Januari-Juni 2026 senilai Rp34.020.000,-

3. Matriks Revisi Satuan Kerja Loka PSPL Serang T.A 2025

No	Revisi Ke	Revisi Oleh	Tanggal	Digital Stamp	Pagu	Keterangan
1	Pagu Awal	DJA	2 Desember 2024	8500 8896 0636 5966	16.345.154.000	Pagu Definitif
2	Revisi ke-01	KPA	3 Jan 2025	8500 8896 0636 5966	16.345.154.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
3	Revisi ke-02	KPA	23 Jan 2025	8500 8896 0636 5966	16.345.154.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
4	Revisi ke-03	DJA	23 Feb 2025	0209 2081 4529 0542	16.345.154.000	Efisiensi Inpres No. 1 Tahun 2025
5	Revisi ke-04	Kanwil	28 Feb 2025	0209 2081 4529 0542	16.345.154.000	Revisi pemutakhiran Halaman III DIPA TW I 2025
6	Revisi ke-05	DJA	10 Apr 2025	0209 2081 4529 0542	16.345.154.000	Relaksasi Blokir Kode A (Efisiensi Inpres No. 1 Tahun 2025)
7	Revisi ke-06	Kanwil	15 Apr 2025	0209 2081 4529 0542	16.345.154.000	Revisi pemutakhiran Halaman III DIPA TW II 2025

8	Revisi ke-07	DJA	17 Juni 2025	0909 9612 3472 9383	16.345.154.000	Revisi Buka Blokir Kode 2 Sumber Dana PNBP
9	Revisi ke-08	Kanwil	9 Juli 2025	0909 9612 3472 9383	16.345.154.000	Revisi pemutakhiran Halaman III DIPA TW III 2025
10	Revisi ke-09	KPA	22 Juli 2025	0909 9612 3472 9383	16.345.154.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
11	Revisi ke-10	KPA	10 September 2025	0909 9612 3472 9383	16.345.154.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
12	Revisi ke-11	Kanwil	10 Oktober 2025	0909 9612 3472 9383	16.345.154.000	Revisi pemutakhiran Halaman III DIPA TW IV 2025
13	Revisi ke-12	DJA	31 Oktober 2025	2358 6060 4064 8653	20.345.154.000	Revisi Anggaran Belanja Tambahan PNBP Tahun 2025
14	Revisi ke-13	KPA	10 November 2025	2358 6060 4064 8653	20.345.154.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
15	Revisi ke-14	DJA	19 November 2025	0001 0313 9766 5704	19.968.400.000	Revisi Anggaran Pengurangan Pagu Belanja Pegawai dalam

						rangka Pergeseran antar Satker dan Relaksasi blokir kode A Tahun 2025
16	Revisi ke-15	KPA	05 Desember 2025	0001 0313 9766 5704	19.968.400.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
17	Revisi ke-16	KPA	12 Desember 2025	0001 0313 9766 5704	19.968.400.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan

PENGUNGKAPAN INFORMASI KINERJA TAHUN 2025 PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 (AUDITED)

1. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Satker Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat pada fungsi Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja LPSPL Serang meliputi 8 (delapan) provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. dengan rincian sebagaimana terlampir.

2. Capaian Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun, pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Pelaksanaannya tidak ada Program Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang melalui 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2365.PBW001							
Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	250,000,000	157,806,369	63.12%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
2366.PBT009							
Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	3,131,144,000	2,545,832,764	81.31%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
2366.RAL001							
Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1,693,856,000	1,668,206,320	98.49%	Unit	10	10	100%

3. Prioritas Nasional 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

4. Prioritas Nasional 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

5. Prioritas Nasional 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

6. Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

7. Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

8. Prioritas Nasional 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Pelaksanaannya tidak ada Program Prioritas Nasional pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dengan jumlah 0 program prioritas, 0 kegiatan prioritas, yang tersebar di 0 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp0 dan realisasi sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-